

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan, hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan. bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan pancasila, seperti termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu serta berkesinambungan.

UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Terciptanya suatu sistem transportasi yang menjamin pergerakan orang dan barang secara lancar, aman, cepat, murah, nyaman, dan sesuai dengan lingkungan merupakan tujuan pembangunan dalam sektor transportasi. Sistem jaringan transportasi yang tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan berbagai hambatan yang mengganggu pergerakan lalu lintas, memperlambat arus orang dan barang, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari.

Transportasi berhubungan erat dengan pengembangan wilayah, karena transportasi adalah salah satu aspek yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Manfaat transportasi dalam kegiatan suatu wilayah dapat dilakukan dengan melihat peranannya dalam sektor ekonomi, yaitu memperbesar jangkauan terhadap sumber bahan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang lebih mudah dan lebih murah yang dibutuhkan suatu daerah. Sistem transportasi wilayah mempunyai hubungan yang erat dengan sistem sosial ekonomi, dimana sistem transportasi akan selalu mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan sistem ekonominya.

Keberhasilan pembangunan transportasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga akan mempercepat pengembangan suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan perekonomian akan meningkatkan peranan sektor transportasi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, sebaliknya fungsi sektor transportasi akan merangsang peningkatan pembangunan ekonomi, karena antara fungsi sektor transportasi dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik (Tamin, 2000). Jika pemerintah tidak menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan suatu wilayah, maka wilayah tersebut mungkin akan tetap bergantung pada daerah daerah luar, dan akan mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas. Kelangkaan sarana dan prasarana transportasi dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan sumber daya yang dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan. Hal ini penting selain sebagai prasarana transportasi manusia dan barang, jalan juga berfungsi untuk membuka

disparitas antar wilayah bersangkutan yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

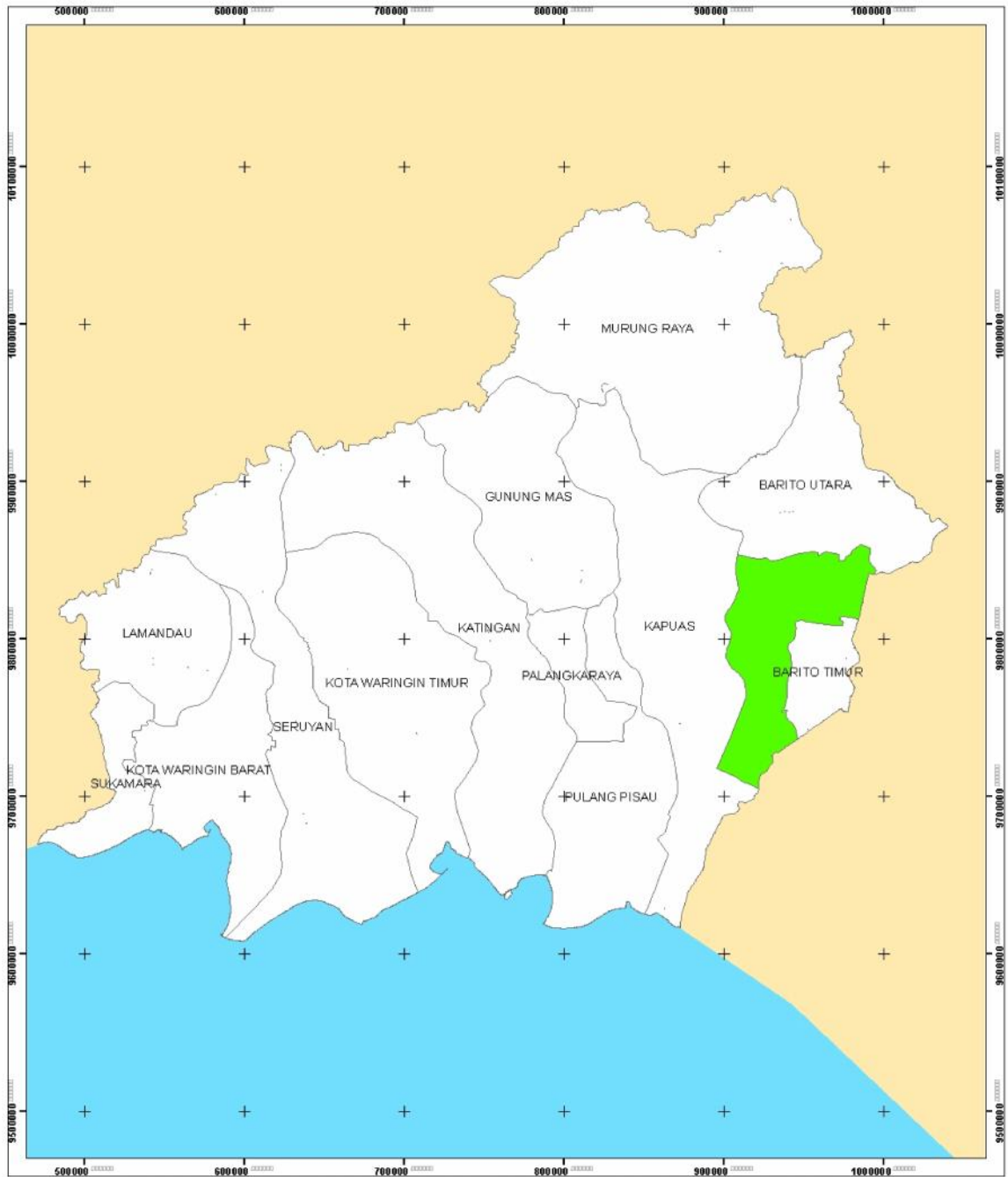
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara Geografis terletak di poros tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur di sebelah Timur, Kabupaten Kapuas di sebelah barat, Kabupaten Barito Utara di sebelah utara, dan provinsi Kalimantan Tengah di sebelah selatan dengan ibukota kabupaten terletak di Buntok. Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 12.664 Km². Secara geografis terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis di antara 1°20' LU - 2°35' LS dan 114° - 115° BT. Setelah pemekaran pada tahun 2002, luas daerahnya menjadi 8.830 Km², yang secara administratif terdiri dari 6 (Enam) kecamatan. Batas-batas wilayahnya meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur.

Kabupaten Barito Selatan mempunyai 6 (Enam) Kecamatan :

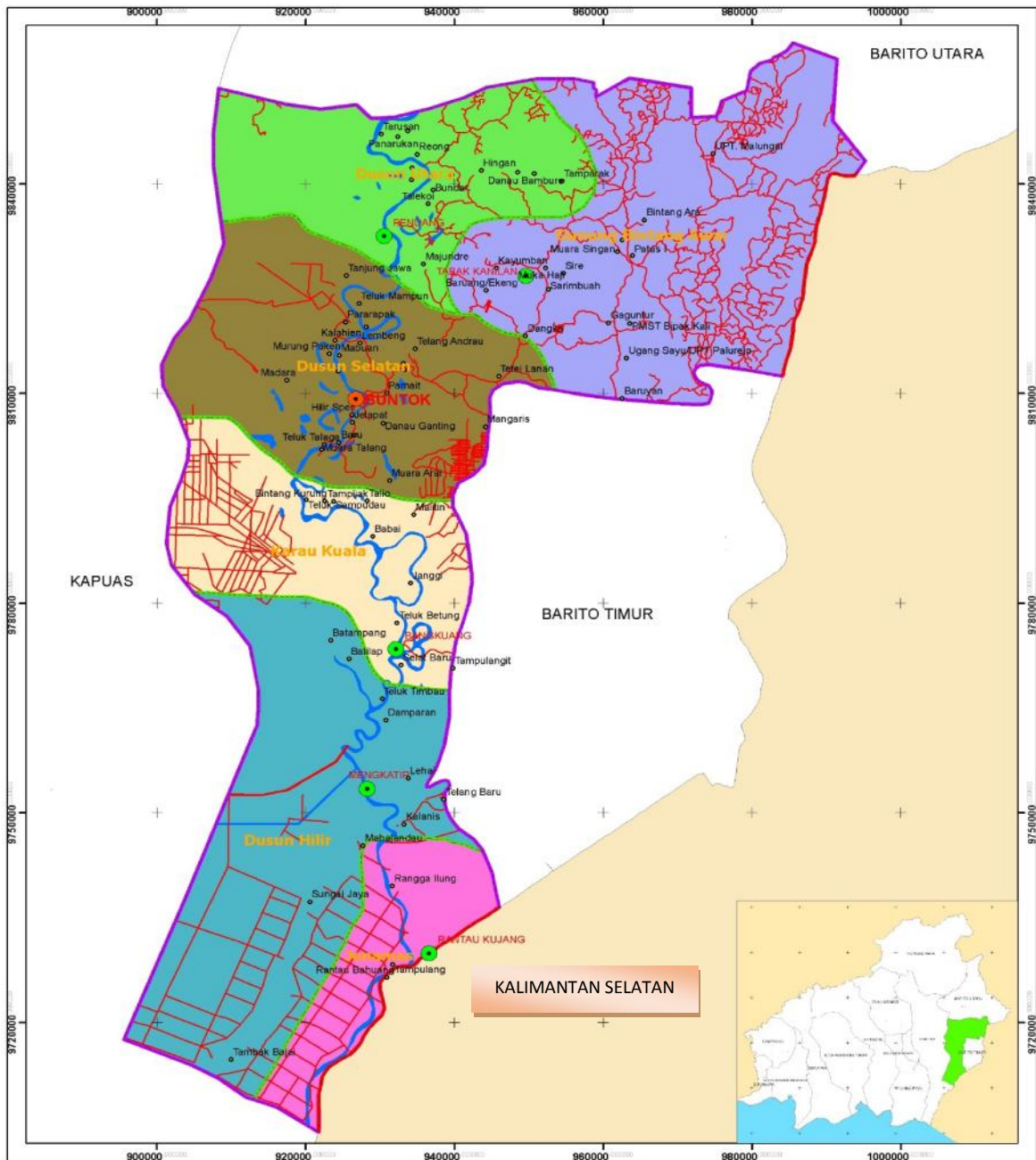
1. Dusun Selatan
2. Dusun Utara
3. Karau Kuala
4. Gunung Bintang Awai
5. Jenamas
6. Dusun Hilir

Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Barito Selatan tercatat 8.830 km² meliputi 6 (Enam) kecamatan dengan 95 (Sembilan Puluh Lima) desa/kelurahan termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan Dusun hilir dan Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan kecamatan terluas, masing-masing 2.065 km² dan 1.933 km² atau luas kedua kecamatan tersebut mencapai 45,28% dari seluruh wilayah Barito Selatan. Gambaran wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2. berikut ini:



Sumber : RTRW Kab. Barito Selatan 2014-2024

Gambar 1.1
Peta Orientasi Wilayah Studi Terhadap Provinsi
Kalimantan Tengah



Sumber : RTRW Kab. Barito Selatan 2014-2024

Gambar 1.2.
Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan

Posisi cukup strategis tersebut menjadikan Kabupaten Barito Selatan menjadi jalur perlintasan dari maupun menuju ibukota provinsi yaitu Palangka Raya bahkan jalur lalu lintas menuju Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan posisi tersebut secara regional sangat menguntungkan Kabupaten Barito Selatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai pada wilayah-wilayah kecamatan di sekitarnya. Kondisi ini tentunya perlu didukung dengan kondisi infrastruktur khususnya jaringan jalan yang mantap dan memadai. Sebagian jalan di Kabupaten Barito Selatan merupakan jalan penghubung dengan daerah lain seperti Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Tamiang Layang (Kabupaten Barito Timur), dan Kapuas (Kabupaten Kapuas), yang semuanya berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Barito Selatan. Selain itu terdapat jalan-jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan dengan kondisi jalan yang bervariasi. Kondisi jaringan jalan tersebut secara umum masih dapat dibagi dalam dua bagian:

1. Jalan mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah `baik/sedang' dan hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya `rusak/rusak berat' yang memerlukan `pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4.

Jalan mantap didefinisikan sebagai jalan yang fungsional, selalu bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dengan kondisi secara umum baik maupun sedang, dan walaupun mengalami kerusakan hanya kerusakan ringan. Jalan mantap sebagian besar berkondisi permukaan aspal, dan sebagian kecil berkondisi permukaan perkerasan atau lapis pondasi jalan baik agregat A maupun B. Apabila mengalami kerusakan, penanganannya cukup melalui kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi.

Jalan tidak mantap merupakan jalan yang tidak fungsional, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, dan kondisinya secara umum mengalami kerusakan baik rusak sedang maupun rusak berat. Jalan tidak mantap sebagian besar berkondisi permukaan base course atau timbunan tanah (biasa/pilihan), dan sebagian kecil berkondisi permukaan tanah dasar atau badan jalan/subgrade. Apabila mengalami kerusakan, penanganannya harus melalui kegiatan rehabilitasi berat/rekonstruksi, peningkatan maupun pembangunan.

Total panjang Jalan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 1.165,46 km. Berdasarkan klasifikasi jalan, 30 km merupakan jalan negara, 97,9 km jalan propinsi dan 1.037,56 km jalan kabupaten dengan kondisi permukaan jalan sepanjang 234,61 km diaspal, 181,32 kerikil, 612,88 km tanah dan 136,65 km tidak dirinci. Berdasarkan data tersebut diatas, persentase jalan mantap di kabupaten Barito Selatan mencapai 46,05 % yang idealnya harus mendapatkan prioritas untuk ditangani dengan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan baik rutin maupun berkala, serta sebanyak 53,95% jalan tidak mantap yang perlu penanganan pekerjaan berat yang memerlukan kebutuhan dana yang besar dan biasanya melebihi anggaran yang tersedia. Oleh sebab itu diperlukan suatu

sistem untuk menyaring dan menyusun urutan prioritas penanganan sehingga efektif dan efisien.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan saat ini untuk mendorong penanganan jaringan jalan di Kabupaten Barito Selatan namun masih belum optimal. Banyaknya jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan, sementara aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan hanya sebagian kecil yang direalisasikan dalam APBD dan penentuan skala prioritas yang telah dilakukan selama ini masih didominasi kebijaksanaan pengambil keputusan (legislatif/eksekutif) dalam menetapkan kebijakan tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan objektif sering membuat perubahan prioritas penanganan jalan. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan ilmiah untuk dapat mengurangi subyektifitas para pengambil keputusan.

Mengingat banyaknya ruas jalan yang harus ditangani oleh Pemerintah kabupaten Barito Selatan baik itu peningkatan maupun rehabilitasi/pemeliharaan jalan sedangkan dana penanganan jalan sangat terbatas , maka perlu ditetapkan prioritas penanganan ruas jalan agar alokasi dan penggunaan dana yang terbatas menjadi efektif dan efisien bagi pembangunan prasarana jalan di kabupaten Barito Selatan. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan jaringan jalan kabupaten yang terstruktur dan sistematis berbasis skala prioritas melalui penelitian “ **Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten Barito Selatan Dengan Metode AHP**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria dan faktor yang menentukan dalam menyusun prioritas penanganan jalan di Kabupaten Barito Selatan?
2. Bagaimanakah skala prioritas penanganan jalan di Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan metode AHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menentukan kriteria dan faktor yang menentukan dalam menyusun prioritas penanganan jalan di Kabupaten Barito Selatan;
2. Menentukan skala prioritas penanganan jalan di Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan metode AHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen konstruksi khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan umum jaringan jalan
2. Mengetahui inventarisasi jalan kabupaten secara menyeluruh dan skala prioritas penanganan jalan dengan mengacu hasil studi yang akan dilakukan
3. Sebagai bahan untuk rekomendasi kepada pihak terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan

Umum dalam melakukan perencanaan program infrastruktur jalan kabupaten.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan tujuan memberi arah yang lebih baik dan jelas. Dalam hal ini batasan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Batasan wilayah studi dan pengambilan data dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Bidang Bina Marga.
2. Batasan materi studi adalah penentuan faktor dan kriteria dalam menyusun skala prioritas penanganan jalan serta menyusun skala prioritas penanganan jalan kabupaten menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

1. Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang teori, atau pendekatan teori, proposisi dan konsep yang relevan untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III Metode Penelitian akan diuraikan tentang rancangan dan diagram alir penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, serta responden penelitian.

4. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan :

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan akan diuraikan tentang data yang akan diperlukan/dipergunakan, proses pengumpulan data tersebut, serta hasil pengumpulan data dalam bentuk rekapitulasi dan kompilasi data sesuai kebutuhan data dalam gambar dan tabel serta proses penyelesaian rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teori, atau pendekatan teori, propisisi, konsep yang telah diuraikan pada Bab II (Tinjauan Pustaka) dan Bab III (Metode Penelitian).

6. Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V Kesimpulan dan Saran akan diuraikan intisari dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan rangkuman jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran dan rekomendasi dalam penelitian ini merupakan rekomendasi anjuran tentang prospek dari hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah.